

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran dan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir memiliki peranan penting dalam pengembangan sektor pariwisata lokal. Meskipun sektor pariwisata di Samosir telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat dinamika politik anggaran yang belum sepenuhnya optimal. Transparansi, akuntabilitas, dan alokasi anggaran yang tepat masih menjadi tantangan utama, yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kapasitas pemerintah daerah. Pentingnya politik anggaran yang mendukung pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Selain itu, pengelolaan retribusi yang lebih efektif dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi wisata dan ekonomi di daerah tersebut.

Kebijakan politik anggaran dalam pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir belum optimal dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi PAD Kabupaten Samosir, seperti yang terlihat dari data pendapatan retribusi dan jumlah kunjungan wisatawan. Meskipun kontribusinya besar, fluktuasi PAD menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang lebih strategis dan stabil sangat dibutuhkan.

Kabupaten Samosir memiliki potensi yang cukup besar dengan kekayaan alam dan budaya dan sejarahnya yang menarik wisatawan, namun pengembangan pariwisata masih terhambat oleh kurangnya infrastruktur serta kapasitas SDM dan juga dukungan anggaran yakni keuangan daerah yang masih belum mencukupi untuk menunjang pengembangan pariwisata lokal.

2. Transparansi dalam tata kelola dana retribusi masih menjadi tantangan, dengan indikasi bahwa alokasi anggaran seringkali kurang akuntabel dan tidak sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal atau mendukung fasilitas pariwisata secara optimal. Dibutuhkan peningkatan pengawasan, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola anggaran agar tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat tercapai. Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya DPRD perlu memperbaiki tata kelola anggaran dengan melibatkan masyarakat lokal dan pihak terkait seperti Bupati, Dinas Pariwisata dalam proses perencanaan dan pengawasan. Pentingnya pengelolaan berbasis kinerja yang dimana retribusi yang dihasilkan sebaiknya digunakan untuk peningkatan fasilitas wisata yang berorientasi pada keberlanjutan. Serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Masyarakat lokal dan sektor swasta untuk mencapai hasil pengembangan wisata yang lebih optimal dan mendukung pengembangan infrastruktur wisata serta pelatihan SDM untuk mendukung pariwisata yang lebih kompetitif. Dalam hal meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir pemerintah daerah telah mengupayakan penggunaan transaksi pembayaran secara online melalui QRIS sehingga tercatat secara online. Terkait alokasi anggaran serta pendapatan dari pengelolaan retribusi wisata

Kabupaten Samosir juga sudah di update dan tertera langsung serta dapat di akses oleh semua masyarakat melalui web Kabupaten Samosir, yang di update secara waktu berkala.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Politik Anggaran : Dinamika Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pengembangan Pariwisata Lokal Kabupaten Samosir

Diberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah daerah harus mengembangkan sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan dengan lebih meningkatkan penggunaan teknologi seperti sistem informasi keuangan berbasis digital dapat mempermudah pelaporan dan pengawasan anggaran retribusi objek wisata.
2. Pemerintah daerah khusus nya DPRD agar melakukan evaluasi rutin terhadap tarif retribusi, lokasi pemungutan, dan mekanisme pengumpulan retribusi untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.
3. Pengalokasian anggaran untuk proyek-proyek strategis yang langsung berdampak pada peningkatan daya tarik wisata, seperti pengembangan infrastruktur (akses jalan, fasilitas umum), promosi pariwisata, dan pelatihan SDM agar masyarakat lokal ikut terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan objek wisata.

Hasil dari penelitian yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak sekali kekurangan dan tidaklah sempurna baik dari data kepustakaan, temuan lapangan maupun

pengetikan sehingga tulisan ini belum konprehensif. Maka penulis berharap agar ada kritikan atau masukan dari pihak akademisi, mahasiswa, dan para pembaca. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk membahas secara lebih lanjutan dan membedahnya lagi secara mendalam pada penelitian berikutnya.